

**SKRIPSI**

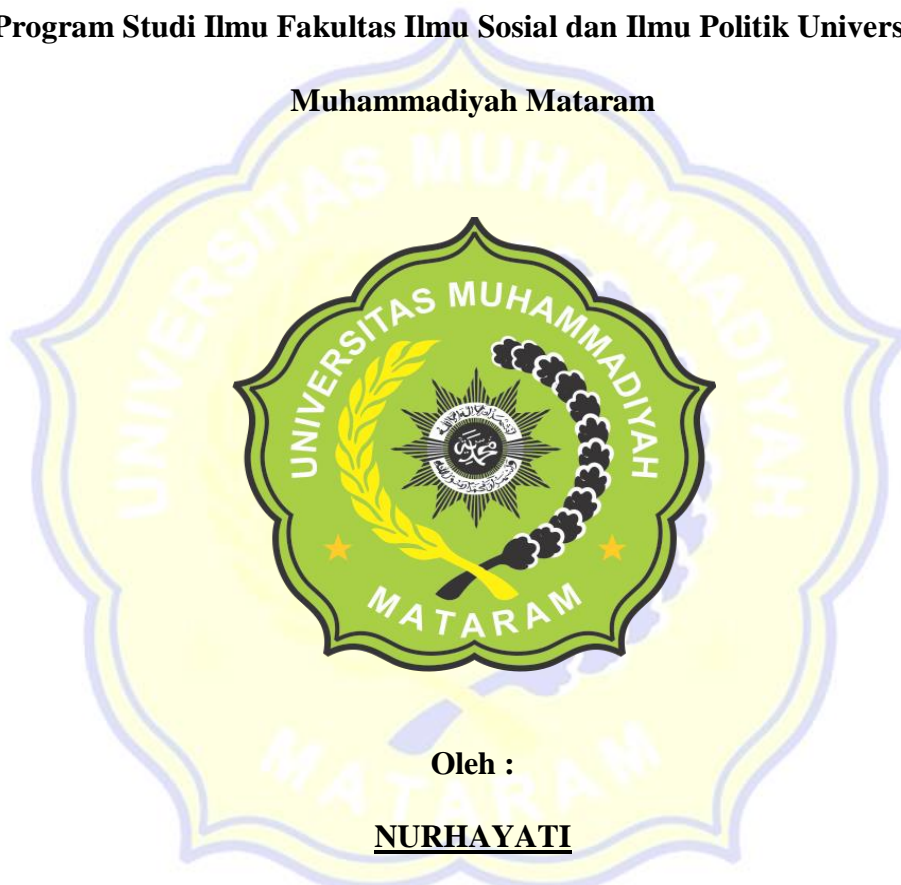
**SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM  
MENANGGULAGI PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)**

**(Studi Kasus Desa Sori Sakolo kec.dompu Kab. Dompu 2018)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Guna Mencapai Derajat S-1**

**Program Studi Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas**

**Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

**NURHAYATI**

**21513A0057**

**ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM  
MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DESA SORI SEKOLO  
KEC. DOMPU KAB. DOMPU**



Disusun dan diajukan oleh :

**NURHAYATI**  
NIM : 21513A0057

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi  
Mataram, 2 Januari 2020

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Abdurrahman".

**Drs. Abdurrahman, MM**  
NIDN. 0806066801

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iwin Ardyawin".

**Iwin Ardyawin, S.Sos., MA**  
NIDN. 0818059002



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Awatullah Hadi".  

**Awatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM  
MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DESA SORI SEKOLO  
KEC. DOMPU KAB. DOMPU



Disusun dan diajukan oleh :

**NURHAYATI**

**NIM : 21513A0057**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal : 2 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji :

- |   |      |         |
|---|------|---------|
| 1. <b><u>Drs. Abdurrahman, MM</u></b><br>NIDN. 0806066801     | (PU) | (.....) |
| 2. <b><u>Iwin Ardyawin, S.Sos.,MA</u></b><br>NIDN. 0818059002 | (PP) | (.....) |
| 3. <b><u>Drs. Amil, MM</u></b><br>NIDN.0831126204             | (PN) | (.....) |



Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan

**Drs. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sejanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengatahuan saya tidak juga terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati  
NIM : 21513A0057  
Tempat/Tgl Lahir : Dum. P. 06-11-1996  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisi. Pol.  
No. Hp/Email :  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

...sisi rurgi pemerintahan desa dan masyarakat dalam wawancara  
...pungutan liar (pungli)  
...Studi kasus desa sori serolo kec. clumpu kab. clumpu 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 22-09-2020

Penulis



Nurhayati  
NIM. 21513A0057

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## ➤ **MOTTO**

- **Sesungguhnya masih banyak orang di dunia yang lebih susah dari kita, maka hentikanlah segala keluhan hati, saling berbagi dan**

➤ **Bersyukur terhadap apa yang kita punya.**

➤ **(Dwitasaridwita)**

- **Seorang pemenang yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu**

➤ **Melawan amarahnya dengan kesabaran dan**

➤ **Memaafkan dengan ketulusan hati.**

➤ **(Dwitasaridwita)**



## PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih, dengan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- *My Mama and ayah tercinta, terimakasih atas doa dan kasih sayang untukku, serta motivasi yang luar biasa yang telah di berikan untukku sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.*
- *Edi irawan, terimakasih juga atas doa serta motivasi yang luar biasa yang telah kalian berikan untukku sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.*
- *Teman -teman sina, ilham,amirah yang tersayang terimakasih untuk motivasinya.*
- *Bangtan Sonyeondan ( Jimin, Jaehyung, Jungkook ) dan Vixx ( Ken, Hongbin ), terimakasih telah menemani penulis dengan music yang super keren.*
- *Untuk teman-temanku Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya Ilmu Pemerintahan, Kosentrasi Manajemen Pemerintahan terimakasih untuk persahabatannya selama ini dan kebersamaan kita selama ini.*
- *Almamater, Universitas Muhammadiyah Mataram.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“SINERGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)”** Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Dekan fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak ayatulah hadi S.IP,.M.I.P, selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Abdurrahman, M.M, selaku Dosen Pembimbing Utama dan
5. Bapak Iwin Ardyawin, S,SOS,M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas Bimbingan, Saran, dan Motivasi yang diberikan
6. Bapak/ibu dosen Fakultas ilmu sosial dan illmu politik khususnya program studi ilmu pemerintah Universitas muhammadiyah mataram yang telah memberikan ilmu bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai serjana S-1



7. Masyarakat kepala desa dan staf-staf desa di desa sori sekolo yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
8. Semuaha pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu pengumpulan data serta memperlancarkan penulis skripsi.

Semonga kebaikan yang mereka berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan pahala dari allah SWT , penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan kritikan dan saran penulis harapan demi membangun sebuah pemahaman dan penulis karya ilmiah.yang lebih baik lagi besar harapan penulis semonga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Mataram 2018  
penulis

**Nurhayati**

**Nurhayati, 2020. Sinergi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Menanggulagi Pungutan Liar (Pungli) (Studi Kasus Desa Sori Sakolo kec.dompu Kab. Dompu 2018). Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Pembimbing I : Drs. H. Abdurrahman, MM**

**Pembimbing II : Iwin Ardyawin, S.Sos., MA**

### **ABSTRAK**

Diera reformasi sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulagi pungutan liar baik untuk individu maupun oleh anggota kelompok masyarakat tentu ditujukan kepada pemerintahan. Jadi jika rakyat menginginkan pelayanan itu dengan biaya murah waktu pengerjaan cepat dan dengan mutu yang bagus maka pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan berbagai surat izin seperti SIM,KTP,akte kelahiran dengan biaya mahal, pengerjaan yang tidak pernah selesai dan mutu yang buruk.

Tingginya tingkat ketidak pastian pelayana sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi, oleh karna itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit artinya sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan tentang objek atau variable yang diteliti, adapun pemilihan lokasi yang peneliti pilih selain mudah dijangkau oleh peneliti, serta efektif dan efesien dari segi waktu biaya dan tenaga.

Senergi pemerintah desa masyarakat dalam menanggulagi pungutan liar, dapat dikatakan bahwa sinergi pemerintah desa sori sekolo tidak lagi memintah pembayaran atau melakukan pungli kepada masyarakat yang dilayani proses pelayanan didesa sori sekolo sehinga memberikan dampak positif dalam pemerintah desa dan masyarakat dapat dilihat indikator-indikator yang telah diterapkan yaitu kesopan,keramahan petugas dan tanggung jawab petugas.

**Kata kunci: Pungli Pemerintah masyarakat**

*Nurhayati, 2020. The Synergy of Village Government and Community in Overcoming Illegal Levies (Case Study Sori Sakolo Village, Dompu District, Dompu District 2018). Thesis. Mataram: Muhammadiyah Mataram University*

*Advisor I : Drs. H. Abdurrahman, MM*

*Supervisor II : Iwin Ardyawin, S.Sos., MA*

### **ABSTRACT**

*In the era of reform, the synergy of the village government and the community in starting the collection of liars, both for individuals and by members of community groups, is certainly handling the government. So if the people want the service at a low cost, the processing time is fast and with good quality, the government may not issue various permits such as SIM, KTP, expensive birth certificates, work that is never finished and of poor quality.*

*The high level of service uncertainty as a result of long and tiring service procedures is the cause of the increasing number of people who give up when dealing with corrupt public services, therefore, the symptoms of liars levies are actually a process of community duplication of elite behavior, namely community practice groups. practices carried out by government elites.*

*This study uses a qualitative method, namely by describing and describing the object or variable under study, while the location selection that the researcher chooses is very easy to reach by the researcher, as well as effective and efficient in terms of time, cost and labor.*

*The energy of the community village government in tackling liar charges, it can be said that the synergy of the Sori Sekolo village government is no longer asking for payments or extortion to the people served by the service process in Sori Sekolo village so that it has a positive impact on village government and society. Namely politeness, friendliness of officers and responsibility.*

**Key words: Community government extortion**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
LABORATORIUM BAHASA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

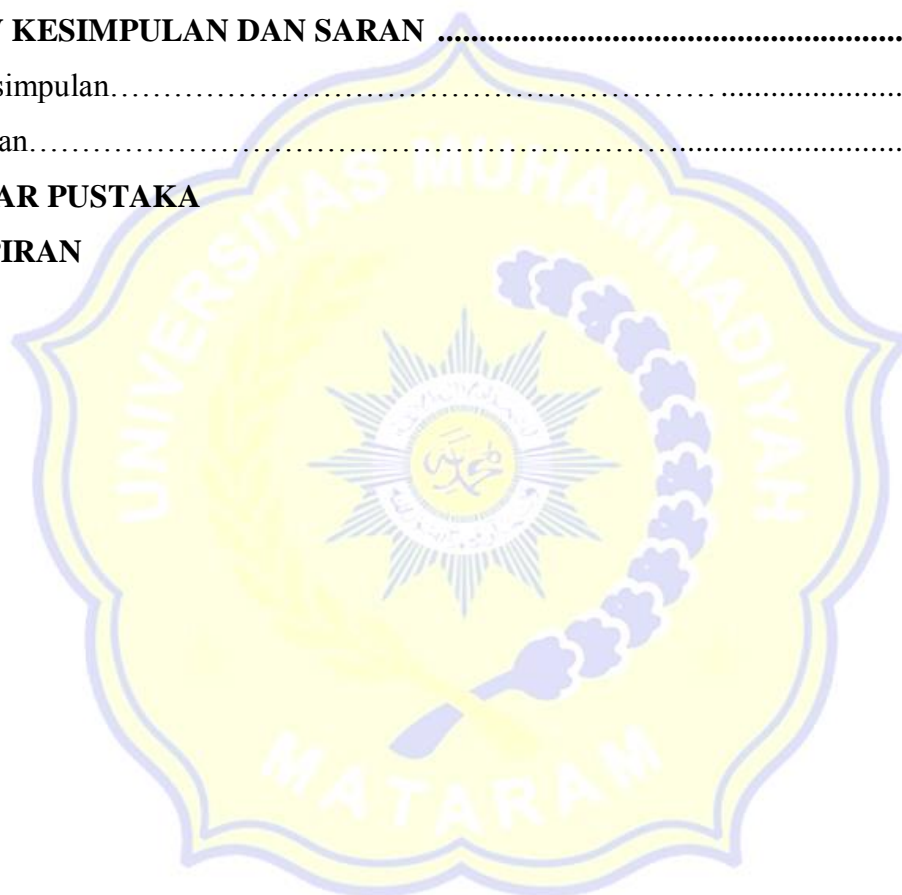
*Abraham, dr. pd. B.S.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Desa.....	9
2.2.1 Pengertian Desa .....	9
2.2.2 Pemerintah Desa.....	10
2.2 sinergi Pemeritahan .....	11
2.2.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	13
2.3 Definisi Pelayanan .....	13
2.4 Pungutan Liar.....	16
2.5 Dampak Pungutan Liar Di Masyarakat .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data .....	26
3.4 Pengumpulan Data .....	28
3 5 Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>

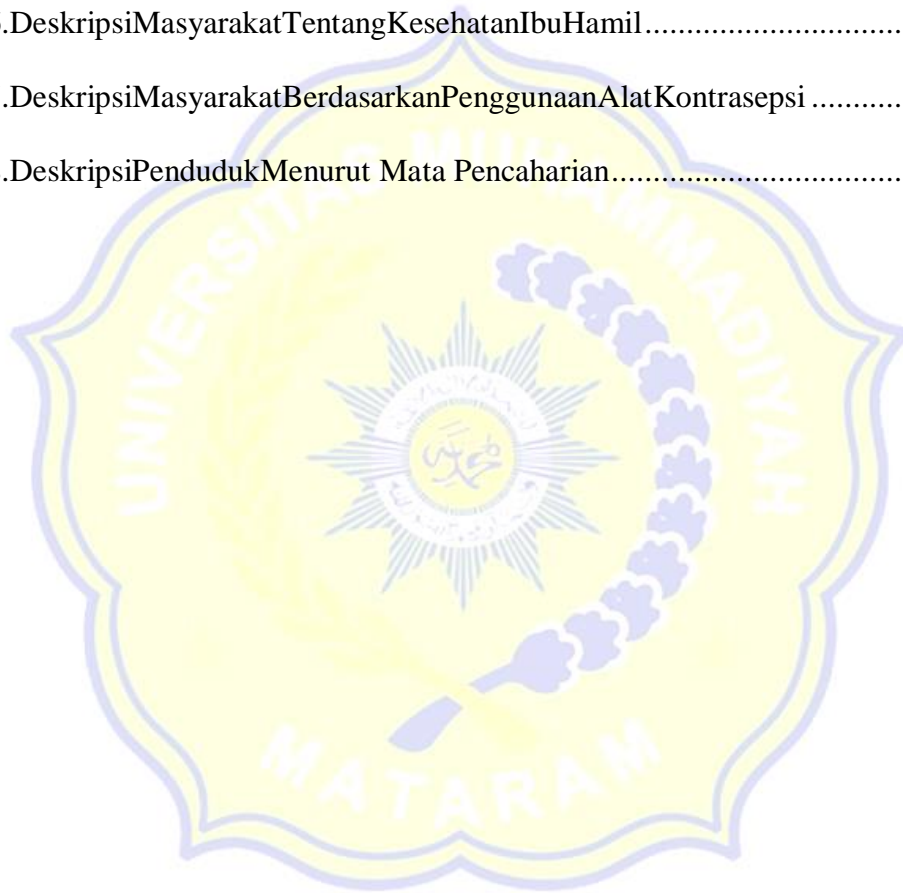


4.1 Deskripsi umum wilayah penelitian .....	33
4.1.1 Sejarah desa sori sekolo .....	33
4.1.2 Kondisi geografi desa .....	34
4.1.3 keadaan sosial.....	35
4.2 Sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulagi pungutan liar (pungli).....	44
4.3 Dampak yang ditimbulkan dari pungutan liar terhadap masyarakat.....	48
4.4 penanggulagi tindak pidana jika terdapat pungli.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tata Gunalahan .....	35
Tabel 2.SaranaPrasana Wilayah .....	36
Tabel 3.DeskripsiPendudukBerdasarkanJenisKelamin .....	38
Tabel 4.DeskripsiPendudukMenurut KK.....	43
Tabel 5.DeskripsiMasyarakatBerdaasarkan Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 6.DeskripsiMasyarakatTentangKesehatanIbuHamil.....	54
Tabel 7.DeskripsiMasyarakatBerdasarkanPenggunaanAlatKontrasepsi .....	60
Tabel 8.DeskripsiPendudukMenurut Mata Pencaharian.....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sinergi pemerintah menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggelar pertemuan dengan pengurus industry beserta para pengusaha, dalam pertemuan membahas situasi ekonomi. Dierah reformasi sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menaggulagi pungutan liar mereka disini berkerja sama untuk menanggulangi pungutan liar baik untuk individu maupun oleh anggota kelompok masyarakat tentuk ditujukan kepada pemerintahan. tuntutan perubahan sering ditujukan kepada pemerintah menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh citra buruk pemerintah ditengah masyarakat. Pemerintahan dibentuk yang dimaksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem tertibaan sosial sehinga masyarakat menjalani kehidupan secara wajar dalam kontes kehidupan dalam bernegara .dalam perkembangan konsep pemerintah mengalami transpormasi pradigama dari yang serba Negara ke orientasi pasar. terjadinya kirisik ekonomi diindonesia ini disebabkan oleh penyelegaraaan pemerintahan yang tidak dikelola yang diatur dengan baik akibat timbulnya masalah seperti kkn yaitu kupsi,kolusi, dan nepotisme.(bapenas 2004 : 01)

Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu asministrasi publik di Indonesia, masi menjadi persolan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah

dibuktikan dimana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai data ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak kita lihat harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat mengalami pembaruan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, Pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam pelayanan.

Pemerintah milik masyarakat, pemerintah birokrasi yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrasi ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat oleh karena itu sinergi harus membangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif kebutuhan masyarakat, dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif dan efisien.

Dalam demikian, pelayanan publik adalah memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara, Negara didirikan oleh publik masyarakat pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah birokrat haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi sebagai kebutuhan yang lain sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Dalam rangka mempertahankan hidupnya, manusia sangat memerlukan pelayanan, baik dari diri sendiri maupun melalui karya orang lain. Pelayanan adalah proses



pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa maupun Negara.

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. (Lijan 2010:53)

Kerusakan reformasi tergantung pada kemampuan operasi organisasi pemerintah setiap hari. Itu berarti tergantung pada ratusan atau ribuan staf tetap yang setiap hari harus menghadapi urusan publik untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Dengan sistem yang tepat, reformasi dapat menjamin dan mendukung sistem, menghasilkan sumberdaya yang cukup, dan waktu yang tepat. Namun, strategi ini bisa berhasil hanya jika sistem yang ada telah membuktikan kinerja yang baik dan mereka yang menjalankannya memiliki sensitivitas politik, cukup profesional dan mampu mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang harus di reformasi. (Ikhsan 2007 :14)

Kinerja birokrasi tidak otomatis lebih baik dari sebelumnya dalam melayani publik. Masih saja mudah ditemui praktik birokrasi yang berusaha mencari pendapatan tambahan dengan ‘menyalahgunakan’ jabatan atau

kekuasaannya. Meskipun sistemnya sudah diperbaiki, tetapi masih saja mudah ditemui perilaku birokrasi yang dengan lincah menciptakan tambahan kesejahteraan dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. (Zaidan 2015:182)

Didalam kehidupan bernegara masyarakat sejatinya adalah pemegang kedaulatan tertinggi, partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat buah dari proses reformasi, dampak dari semua itu masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan tengah dilakukan pemerintah. (Deddy 2015 :184)

Perubahan terhadap reformasi birokrasi dapat muncul dari masyarakat luas yang tidak memahami tujuan kebijakan reformasi birokrasi dan manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Kontroversi yang selama ini terjadi tentang reformasi birokrasi di Indonesia sebagian disebabkan oleh ketidakjelasan dari substansi dari reformasi birokrasi itu sendiri. Minimnya usaha pemerintah untuk mengkomunikasikan dan melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya perubahan dalam birokrasi publik membuat masyarakat kurang mengapresiasi kebijakan reformasi birokrasi. Apatisme masyarakat terhadap kebijakan reformasi birokrasi semakin tinggi ketika menyaksikan kegagalan reformasi birokrasi di kementerian keuangan. (Agus 2011 :331-332)

Apatisme terhadap kondisi birokrasi publik yang sudah sedemikian parah barangkali dapat menjelaskan mengapa sebagian besar warga di banyak daerah cenderung menganggap korupsi dalam birokrasi pelayanan sebagai hal yang wajar. Para pengguna birokrasi pelayanan menilai bahwa membayar pungutan liar (pungli) adalah hal yang wajar dan mereka bersedia membayar. Bahkan sebagian di antara mereka justru merasa lega setelah membayar pungli karena merasa urusannya dapat segera diselesaikan. Apatisme terhadap kondisi yang terjadi dalam birokrasi dan kecenderungan para pemangku kepentingan untuk

beradaptasi dengan kondisi yang buruk dalam birokrasi dapat menghambat reformasi birokrasi. Masyarakat yang telah terbiasa dengan kondisi buruk dalam birokrasi dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada justru melihat perubahan sebagai suatu yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan memaksa mereka untuk mengamankan kepentingannya. Dalam konteks ini, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan harus dilakukan agar mereka memiliki informasi yang lengkap tentang manfaat yang akan diterimanya dari perubahan birokrasi publik.

Ketika para pelaksana dan para pemangku kepentingan mulai merasakan efek yang tidak menguntungkan dari perubahan birokrasi, sementara manfaat yang diharapkan belum dapat dirasakan, seringkali muncul keraguan diantara mereka, apakah reformasi birokrasi memang pilihan kebijakan yang tepat dan perlu dilanjutkan atau sebaliknya. Pelaksana reformasi birokrasi juga membawa banyak harapan baru bagi banyak pihak yang selama ini sudah lama menunggu terjadinya perubahan yang mendasar dalam kehidupan birokrasi publik di Indonesia. Para pengusaha, warga pengguna, serta pentingnya anti korupsi dan masyarakat sipil yang meyakini reformasi birokrasi akan membawa perubahan sosok dan perilaku birokrasi tentu akan menyambut gembira pelaksanaan reformasi birokrasi itu.

(Agus 2011 :332)

Pelayanan dalam pemerintahan adalah sama apa yang diinginkan oleh rakyat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, jadi jika rakyat menginginkan pelayanan itu dengan biaya murah, dengan waktu pengerjaan cepat dan dengan mutu yang bagus maka pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan berbagai surat izin seperti SIM, KTP, Akta Kelahiran dengan biaya mahal, pengerjaan yang tidak pernah selesai dan mutu yang buruk. (Inu Welasari 2015 :216)

Pemerintahan desa Sori Sekolo merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua

program. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terus mengalami pembaruan terutama dari segi format pelayanan. Namun seiring dengan tuntutan masyarakat tentang pelayanan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.

Kinerja yang profesionalitas pemerintah desa yang paling mudah dinilai dan dirasakan oleh masyarakat adalah dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang bersangkutan. Pelayanan publik yang buruk mencerminkan pemerintah desa yang korup dan berkinerja rendah. Kondisi lain yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat adalah masih banyaknya pemerintah desa yang melakukan pemungutan liar, mempersulit dan menunda-nunda pelayanan.

Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah desa, mulai dari urus akta kelahiran sampai dengan urusan surat kematian. Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pada implementasinya pelayanan publik yang terjadi selama ini di desa masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan dengan alasan sesuai prosedur. Banyaknya biaya pemungutan, dan waktu yang sangat lama, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan efisien. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masih banyak nya masyarakat yang apatis sehingga tanpa tersadari masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap pemerintah setempat.

Para pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, efektivitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan oleh pemerintah desa memerlukan patokan lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpangan



seperti pelayan yang lambat sehingga membuat pemerintah melakukan pemungutan liar (pungli) dalam memberikan pelayanan tidak dapat dihindari. Pentingnya ukuran ini juga memperhatikan bahwa pemerintah desa cenderung menetapkan target dan dalam pencapaian target dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh demikian perlu diteliti dan dikaji lebih mendalam apa sinergi pemerintah dari suatu perubahan, maka penulis menyatakan judul penelitian

**“Sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pemungutan liar (pungli) dikantor Desa Sori Sakolo Kab. Dompu kec. Dompu Tahun 2018”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang di atas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sinergi pemerintah desa terhadap masyarakat dalam menggulagi pemungutan liar (pungli)?
- b. Bagaiman dampak pungli terhadap masyarakat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui sinergi pemerintah desa terhadap masyarakat dalam menanggulagi pemungutan liar(pungli).
- b. Untuk mengetahui sinergi pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan dan masyarakat dalam menggulagi pemungutan liar (pungli).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diajukan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan teoritis, mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan sinergi pemerintah desa terhadap masyarakat dalam menanggulangi pungutan liar.
- b. Untuk kepentingan praktis, memberikan masukan mengenai sinergi pemerintah desa terhadap masyarakat dalam menanggulangi pungutan liar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

menurut Unang Sunardjo menjelaskan tentang pengertian desa sebagai berikut. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Amin 2009:1)

Desa adalah masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Dalam kaitan ini, tersirat sangat jelas dalam rumusan tersebut bahwa desa-desa yang adasebelum Negara ini merdeka, bukan merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya tidak lagi bebas melaikan (secara teritorial-administratif) langsung berada dibawah kecamatan. Dengan demikian, tidak lagi berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri sebagaimana ketika desa-desa itu belum berada dibawah kekuasaan Negara kesatuan Republik Indonesia. (Muhammad Sar I 2013 :9-10)

Adapun pengertian desa menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 adalah :  
'Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(<http://dermolo.desa.id/2016/08/05/pengertian-desa-pemerintahan-desa-dan-pembangunan-desa-dalam-undang-undang/>)

### **2.2.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintah orde baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 melakukan sentralisasi, birokratisasi, dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Undang-Undang ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa. (Haw. Widjaja 2008 :96)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa ssebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat derdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa (BPD). Sepertiyang dimaksud pada pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :

- 1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya.
- 3) Sekertaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.



Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, pemerintah desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya. Hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah desa sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (desa). (Amin 2009:19).

## **2.2 Sinergi pemerintah**

Sinergi adalah Terkait keanekaragaman budaya serta jenis pelestarian di Indonesia salah satu adalah budaya suku dalam mengelolanya yang berwenang adalah pemerintah daerah diikuti para lembaga adat yang membentuk kerjasama dalam melaksanakan pelestarian sinergi tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sinergi, faktor pendukung dan penghambat sinergi, serta hasil sinergi dalam melaksanakan pelestarian. Penelitian ini metode deskriptif kualitatif.

Sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan ternyata berhasil dilihat dari positif terhadap nilai budaya dan perubahan sosial dan masyarakat, serta keberhasilan mengembangkan potensi

wisata faktor pendukungnya adalah isi peraturan yang mudah dimengerti sikap aktor pelaksanaan dalam menerapkan prinsip sinergi dan ketentuan peraturan faktor penghambat adalah kapasitas SDM dan permasalahan area konservasi otonomi daerah masih ada cela melaksanakan sinergi karena tidak terdapat perda khusus yang mengatur masalah pelestarian kebudayaan suku.

Sinergi pemerintah menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggelar pertemuan dengan pengurus industry beserta para pengusaha pertemuan diselenggarakan membahas situasi ekonomi.

Sinergi pemerintah menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggelar pertemuan dengan pengurus industry beserta para pengusaha pertemuan diselenggarakan membahas situasi ekonomi. Daerah reformasi sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pungutan liar mereka disini berkerja sama untuk menanggulangi pungutan liar baik untuk individu maupun oleh anggota kelompok masyarakat tentu ditujukan kepada pemerintahan. tuntutan perubahan sering ditujukan kepada pemerintah menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh citra buruk pemerintah ditengah masyarakat. Pemerintahan dibentuk yang dimaksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan dalam bernegara. dalam perkembangan konsep pemerintah mengalami transformasi paradigma dari yang serba Negara ke orientasi pasar. terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola yang diatur

dengan baik akibat timbulnya masalah seperti pemungutan liar yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Bapenas 2004 : 01-02)

### **2.2.1 Indikator sinergi**

Dalam suatu kerjasama atau kementerian yang harus berada pada kompetensinya adalah menjadi pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha pada konteks keterkaitan masing-masing dasar sinergi berlaku bahwa jika salah satu tidak ada pada saat kesepakatan kerjasama dilakukan maka sinergipun akan menjadi perangkap premium kemungkinan dengan kondisi persaingan itu dasar sinergi ini perlu ditekankan tetapi bukan satu-satunya komponen yang menentukan untuk menjamin pencapaian tujuan, sinergi menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggelar pertemuan dengan pengurus industri meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggelar pertemuan dengan pengurus industri. Merupakan berkerja sama pemerintah dan masyarakat untuk individu maupun oleh kelompok masyarakat, tuntutan perubahan yang sering ditujukan kepada pemerintah menyangkut pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terjadinya krisis ekonomi ini disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintah yang tidak dikelola yang diatur dengan baik akibat timbul sebuah permasalahan seperti pungli.

### **2.3 Definisi pelayanan**

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuh kebutuhan dasar manusia

seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkannya kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. (Dyah & Arif 2014 :89)

Pelayanan berasal dari kata dasar layan, melayani, menyediakan sesuatu yang diperlukan orang lain atau pelayanan artinya melayani. (Poerwadiminta :2001;579). Sementara itu pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moenir 2002,16). Dari pendapat diatas pelayanan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan melayani atau menyediakan apa yang diperlukan orang lain. (Rosdiana 2014 :9)

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam satu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara (Lijan 2010 :4-5)

Dalam mendefinisikan pelayanan ini sering dikaitkan dengan jasa bahkan ada yang menyamakan istilah pelayanan ini dengan jasa seperti yang diungkapkan oleh pakar sebagai berikut : jasa atau pelayanan adalah setiap kegiatan / manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.



proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan sesuatu fisik. Pengertian pelayanan yang dimaksud dalam penelitian itu adalah pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan. (Dyah & Arif 2014 :89)

### **2.3.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga Negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap Negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi negara sebagai abdi masyarakat. Timbulnya pelayanan atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Ada beberapa jenis pelayanan atau publik antara lain:

#### **1. Pelayanan Administratif**

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat tanda kendaraan Bermotor (STNK), Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

## 2. Pelayanan Jasa

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. (Deddy 2015 :212-213)

### 2.4 Pungutan Liar

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (BPKP 2002:6).

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Pungutan liar biasanya disingkat pungli juga merupakan perbuatan tidak bijaksana dan membuktikan bahwa yang melakukan pungli merupakan hamba uang. Karena melakukan pungutan liar merupakan salah satu cara

mendapatkan uang dengan cara meminta uang pada pihak-pihak tertentu. Biasanya disebut sebagai uang pelican yang mana menjadi salah satu favorit yang sering dilakukan oleh orang-orang.(Peter 130-131)

#### **2.4.1 Indikator pungli**

Meskipun fenomenal pungli ini merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai peraturan yang berkaitan pembayaran perbuatan penipuan atau korupsi, dan semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan korupsi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungli yang secara etimologis dapat diartikan sebagai sesuatu memungut bayara/meminta uang secara paksa kepada masyarakat. Jadi pungli dalam kejahatan perlu dilakukan usaha pemecahan sebelum terjadinya kejahatan dengan menciptakan organisasi yang baik, peradilan objek serta hukum yang baik. Pada umumnya tindakan ini dapat berupa hukuman atau sanksi pidana, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan keamanan di antara masyarakat. Manusia sendiri pada dasarnya harus mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi perselisihan di masyarakat. dapat melihat seperti apa efektifnya suatu peraturan dan sanksi dari tindakan pungli jika masyarakat mematuhi peraturan tentang tindak pidana pungli dengan ketaatan internalization maka kesimpulannya bahwa kualitas keefektifan aturan tentang tindak pidana pungli tersebut sudah semakin tinggi.

## 2. 5 Kerangka teori menanggulagi pungutan liar

Didalam kerakang teoritis ini memuat tentang teori-teori yang relevan dengan yang akan penyusun bahasa menjelaskan pulah tentang sebab-sebab terjadinya tidak pidana pungutan liar teori-teori sebagai berikut:

### 1. teori penanggulangan tindak pidana

dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pemecahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki perilaku yang telah mendapatkan keputusan bersama pencegahan suatu kejahatan menjadi usaha yang lebih baik dari pada melakukan usaha perbaikan karena padasarnya apabila kejahatan tersebut dapat dicegah maka seseorang tersebut tidak akan terjermus pada dunia kejahatan dalam hal penanggulagi kejahatan tersebut terdapat dua cara atau dua metode

yaitu: *prevetif* mencegah sebelum terjadi kejahatan dan tindakan *represif* usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan.

#### a. Adapun menurut bonger yang berpendapat tentang hal yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut:

Prevetif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevesif dalam arti sempit. Prevensi yang dimaksud adalah tentang memperteguhkan moral seseorang agar tidak terjermus untuk berbuat jahat serta mencegah tumbuhnya keinginan untuk terjermus kedalam kejahatan.

Berusaha melakukan pengawasan terhadap kejahatan dengan menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan yang baik, sistem peradilan yang objektif serta hukum yang baik. Kemudian untuk metode penanggulangan kejahatan yang kedua adalah tindakan represif. Tindakan ini seringkali dilakukan oleh aparat

#### b. penegak hukum, tindakan ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Pada umumnya tindakan ini dapat berupa hukuman atau sanksi pidana. Dalam metode



ini dapat dilihat dari bahwa dalam penanggulangan pidana dapat diterapkan 2 cara yaitu secara preventif dan represif (Soedjono: 1976: 31)

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo,(2007:22) penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang di rumsukan oleh hukum pidana substantif (*substantife law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini tidak dapat dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi oleh hukum acara pidana yang anantara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, hukum pidana substantive sendiri pun juga memberikan batasan-batasan. Misalnya di butuhkan aduan-aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area *of no enforcement*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan–keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat–alat investigasi serta dana. Yang mengharuskan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. (Simanjuntak:1980:15)

### 3. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan suatu norma yang didalamnya memuat aturan–aturan hidup manusia agar tercapai rasa kenyamanan dan rasa keamanan di antara masyarakat. Manusia sendiri pada dasarnya harus mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat agar tidak terjadi perselisihan di masyarakat. Kepatuhan hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai–nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai–nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan di rasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan mengetahui ketiga jenis kepatuhan tersebut maka kita dapat melihat seperti apa efektifnya suatu peraturan dan sanksi dari tindakan pungutan liar tersebut. Jika masyarakat Indonesia mematuhi peraturan tentang tindak pidana pungutan liar tersebut dengan ketaatan *internalization* maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kualitas keefektifan aturan tentang tindak pidana pungutan liar tersebut sudah semakin tinggi. (Lili Rasyidi: 2001:25).

## **2.6 Dampak pemungutan liar dimasyarakat**

Dalam proses pelayanan publik posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karna daya tawar yang rendah. Masyarakat menyerapkan sejumlah uang tambahan untuk memaksa birokrasi yang kerap melakukan pungutan liar pada sisi lain masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh sumburnya parkte pungutan liar dengan cara mebisakan unag tanpa mampu bersikap kritik melakukan penolakan pembanyaran duluar biaya resmi.

Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi

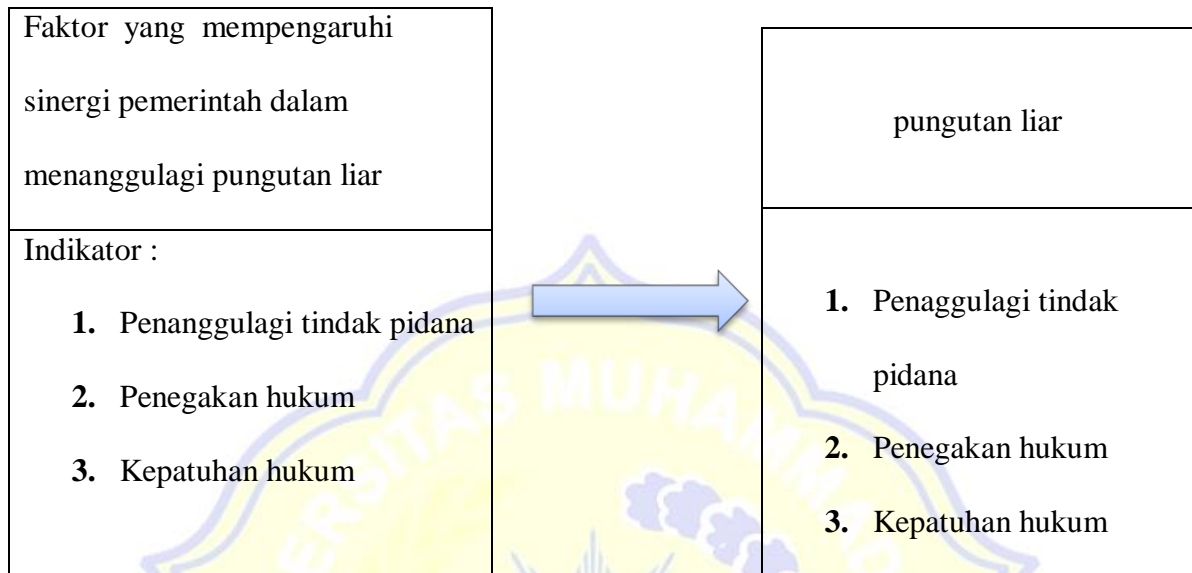
beralasan. Sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanya-tanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan. (Nurhidayah, 2014 :22-23)

## **2.7 Kerangka berpikir**

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep atau variable tersebut. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai “sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) desa sori sekolo kabupaten dompu 2018”, dan akan mengkaji lebih dalam mengenai menanggulangi pungutan liar tindak pidana dua permasalahan yaitu: *pertama*, preventif mencegah sebelum terjadi kejahatan dan tindakan *kedua*, represif, Usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan.



Tabel 2.7 Kerangka berpikir penelitian



## 2.8 Dfinisi konseptual dan operasional

### 2. 8.1 Dfinisi konseptual

Dfinisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-maslah variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya dilapangan. Selain itu dfinisi konseptual yaitu suatu dfinisi yang masi berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maknanya.

Adapun demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan kerangka teori penelitian maka beberapa dfinisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini.

1. Dfinisi sinergi pemerintah dalam menanggulagi pungutan liar

Pengertian Sinergi pemerintah menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggelar pertemuan dengan pengurus industri berserta para pengusaha pertemuan diselanguna membahas situasi ekonomi. Pemerintah dibentuk yang dimaksud untuk membangun peradaban dan menjagasisistem ketertibaan sosial sehinga masyarakat menjalani kehidupan secara wajar dalam kontes kehidupan dalam bernegara yang memangnya pungutan liar bukan hanya soal besar kecilnya keluhan yang sampaikan kesalnya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya ini persoalnya yang harus kita sesalikan jadi bukan masalah sepuluh ribu tapi vungli telah membuat masyarakat kita susah untuk sesuatu urusan.

**2. Penanggulangan pungutan liar**

Penanggulangan kejahatan maka perlu dilakukan usaha pemecahan sebelum terjadinya serta memperbaiki prilaku yang telah mendapatkan putusan bersalah pecegahan suatu kejahatan menjadi usaha yang lebih baik dari pada melakukan usaha perbaikan karna pada dasarnya kejahatan tersebut dapat dicegah maka seorang tersebut tidak akan terjerumus pada dunia kejahatan.

**3. Penegakan hukum**

Merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

#### 4. Kepatuhan hukum

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh terhadap nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

#### 2.8.2 Definisi operasional

Penelitian ini yang berjudul “sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) desa sorisekolo kabupaten dompu 2018” untuk menghindari kesalahpahaman dan munculnya berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan definisi operasional terhadap kosa kata yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

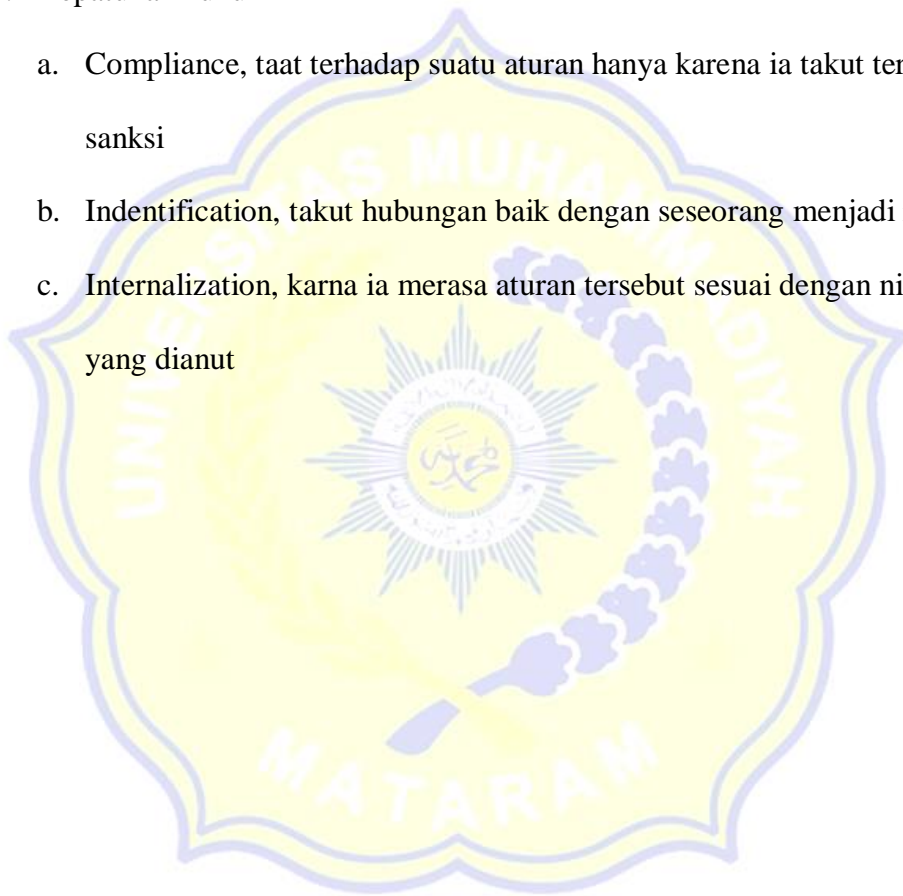
- a. Faktor yang mempengaruhi sinergi pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana
  1. Sinergi pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana
    - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
    - b. Pembangunan peradaban sosial
    - c. Membahas situasi ekonomi
  2. Penanggulangan tindak pidana
    - a. Preventif mencegah sebelum terjadi kejahatan dan tindakan
    - b. Represif usaha yang dilakukan setelah terjadi suatu kejahatan

3. Penegakan hukum

- a. Mencakup aturan penangkapan ,penahanan, penggeledahan
- b. Penyitaan dan pemerisaan pendahuluan
- c. Dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal
- d. Sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu

4. Kepatuhan hukum

- a. Compliance, taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkenal sanksi
- b. Indentification, takut hubungan baik dengan seseorang menjadi rusak
- c. Internalization, karna ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai yang dianut



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menggambarkan tentang objek atau variabel yang diteliti, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dimana data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang sesuai dengan fenomena atau kenyataan sosial sehingga penulis mampu menggambarkan kenyataan kejadian yang diteliti sehingga didapatkan data yang objektif.

#### **3.2 Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian sangat penting ditentukan, sehingga mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun tempat penelitian di Desa Sori Sakolo Kab. Dompu kec dompu tahun 2018.

Adapun pemilihan lokasi yang peneliti pilih selain mudah di jangkau oleh peneliti, serta efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga. Desa sori sakolo merupakan suatu desa yang memiliki penduduk yang cukup banyak serta memiliki latar belakang pendidikan yang bermacam-macam. Pertimbangan dipilihnya lokasi ini karena pemerintah desa yang paling mudah dinilai dan dapat dirasakan langsung oleh



masyarakat dampaknya dari segipelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

### **3.3 Fokus penelitian**

Topik dan fokus merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topic atau fokus itu dapat saja muncul dari tinjauan literature diajukan rekan penelitian atau dikembangkan melalui mengalami nyata (creswell,2007 dan tersiana,2013). Fokus ini juga berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksklusi atau kiriteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (moleong;2011) dengan bimbingan dan arahan suatu fokus seorang penelitian atau persi data mana dan dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan , penelitian akan mengkaji mengenai hal sebagai berikut:

Bagaimana pelaksana menanggulagi pungutan liar tindak pidana dalam menduku previtif dan represif dikabupaten dompu?

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini adalah sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulagi pungutan liar (pungli). Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka peneliti akan menggunakan informasi dari masyarkat sebagai sumber data penelitian

Adapun sumber data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

dapat diperoleh dari masyarakat atau informan yang memiliki hubungannya dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara langsung.

b. Data sekunder

yang merupakan sumber data yang akan melengkapi sumber data primer yaitu dokumen, laporan, arsip lainnya).

### **3.5 Sistem penelitian**

Kita akan wawancara langsung dengan kepala desa dan masyarakat yang bersangkutan dengan Sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pemungutan liar karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka menggunakan informasi wawancara dengan masyarakat sebagai penelitian, untuk mendapatkan data-data dari desa itu sendiri.

### **4.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan Melakukan Wawancara dan Observasi :

a. Metode Observasi

Nasution (1988) Menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Berdasarkan pendapat di atas, maka observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan yang sengaja dilakukan secara langsung.

Pengumpulan data dan analisis data

Dada dikumpulkan melalui wawancara pengamatan dari dokumen atau secara gabungan dari padanya projek khusus teori dasar dalam pelayanan kesehatan cenderung mempunyai sampel dua puluh lima orang dan diselenggarakan dengan jalan wawancara mendalam, pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang diketik atau pita video/audio tentang percakapan yang berisi penggalan data yang nantinya dipilih dan dianalisis, proses ini dilaksanakan dengan jalan membuat kode dan mengkategorisasikan data.

Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara penelitian dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung, analisis data melibatkan upaya mengidentifikasi ciri sesuatu objek dan kejadian oleh anggota budaya makna demikian divalidasi oleh para anggota budaya sebelum hasilnya dipaparkan.

Mikrofon dan alat perekamnya perlu dipasang terlebih dahulu agar dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh peserta diskusi untuk membicarakan satu demi satu guna menghindari suara berisik gaduh yang tidak terdengar, Langkah pertama yang harus dilakukannya adalah membuat transkrip dari keseluruhan wawancara. Hal tersebut akan menyediakan catatan hasil pembicaraan dalam diskusi secara lengkap dan akan memfasilitasi analisis data. Melibatkan terutama melalui terutama melalui pengamatan dan wawancara penelitian dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam budaya yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung analisis data

melibatkan upaya mengidentifikasi ciri sesuai objek dan kejadian oleh anggota budaya makna demikian biasanya divalidasi oleh para anggota budaya sebelum hasil akhirnya dipaparkan. Langkah berikutnya ialah menganalisis diskusi mengadakan analisis ialah mencari kecederungan satu kelompok maupun berbahai kelompok, analisis mulai dari mabadikan kata yang dinggunakan sebagai jawaban juga meneliti harus mempertimbangkan penekanan atau intensitas yang diberikan oleh para peserta pertimbang lainnya berkaitan dengan konsistensi dari tanggapan-tanggapan mengalir analisis data dapat memanfaatkan analisis data secara langsung.

b. Metode Wawancara

Esterberg Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Berdasarkan pendapat diatas, dapat dinyatakan bahwa metode wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab/dialog secara langsung, yang dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Kami langsung wawancara dengan kepala desa atau staf desa dan masyarakat di desa sorisekolo itu sendiri, dengan Peristiwa wawancara ia harus menyadari sekarang bertugas dalam pekerjaan apa, bagaimana penilai masyarakat tentang perkerjaan, perilaku dan hal itu bermanfaat bagi pewawancara sendiri sewaktu berada dalam proses wawancara.

Wawancara terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau membuat karya ilmiah, sosial, pembangunan, perdamaian dan maksud wawancara ini ialah untuk menggunakan riwayat hidup pekerjaannya, wawancara semacam ini dilakukan sedemikian rupa sehingga kepala desa berbicara terus-menerus sedangkan pewawancara duduk mendengarkan dengan baik diselingi dengan sekali mengajukan pertanyaan, Mereka yang tertarik kepada pelaksanaan wawancara.

Wawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, penelitian yang menggunakan jenis wawancara bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja, untuk itu disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representasi ditanyai dengan pertanyaan yang sama dengan hal ini penting sekali semua aspek dipadatkan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kepala desa dengan masyarakat.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpul data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Berdasarkan pendapat di atas maka yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara-cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan jalan mencatat keterangan-keterangan yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan masalah yang akan ditulis.



Dokumen resmi berbagai atas dokumen internal dan dokumen eksternal:

1. Internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, termasuk didalamnya risalan atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan sebagainya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, dan dapat memberikan petunjuk dari gaya kepemimpinan.
2. Eksternal berisis bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial misalnya, majalah, buleten, pernyataan dan berita yang disisrkan kepada media masa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, kepemimpinan.

Untuk memanfaatkan dokumen yang pada isi biasanya digunakan tehnik tertentu. Tehnik yang paling umum digunakan ialah content analysis atau disini dinamakan kajian isi untuk menggunakan kajian isi seseorang hendaknya mengikuti kursus dan latihan khusus yang diadakan untuk itu. Oleh karna itu, apa yang diuraikan disini barura merupakan prinsip dasar dan apabila seseorang tertarik untuk mendalaminya, sebagai ia mengikuti latihan khusus tersebut.

### **3.7 Tehnik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan cara memberikan gambaran tentang sinergi pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi pemungutan liar (pungli). di desa Sori Sakolo kecamatan Dompu kab. Dompu. Penelitian ini menggunakan data kualitatif maka hasil analisis data bersifat deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. (Sugiyono, 2014:24)

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Peneliti mereduksi data dengan memilih data-data hasil wawancara observasi dan dokumentasi.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Akan tetapi dalam penelitian kualitatif menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014 :243)

